

Optimizing the Role of Local Government in the Development of Sustainable Tourism

Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Puput Mulyono¹, Arditya Prayogi², Aris Prio Agus Santoso³, Zaenal Mustofa⁴,

^{1,3,4} Universitas Duta Bangsa Surakarta, Solo – indonesia, ² UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan – Indonesia,

Corresponding author: Puput Mulyono (puput_mulyono@udb.ac.id)

Article Information: submission received 20 November 2025; revision: 22 December 2026; accepted 25 January 2026; first published online 28 January 2026

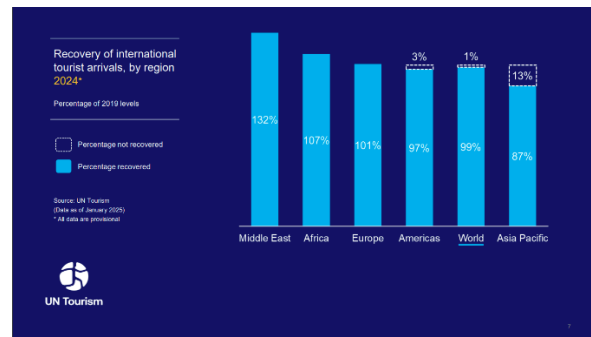
Abstract

The rapid recovery of the tourism sector in the post-pandemic era has increased the need for sustainable tourism development at the local level. Local governments have a strategic role in ensuring that tourism growth is able to provide economic benefits while maintaining social and environmental sustainability. However, various empirical evidence shows that the implementation of sustainable tourism policies at the regional level is still uneven and often faces institutional challenges and coordination between stakeholders. This study aims to analyze the role of local governments in encouraging sustainable tourism development and identify strategies for optimizing these roles in the current governance context. This research uses a qualitative descriptive approach with a policy and stakeholder analysis framework. Data was collected through document analysis of regional tourism policies, development plans, and relevant secondary data sources, and analyzed using thematic analysis techniques. The results of the study show that local governments generally play the role of regulators and facilitators, but the effectiveness of these roles is still limited by limited institutional capacity, weak collaboration between stakeholders, and the lack of optimal integration of sustainability principles in operational practices. This research also identifies opportunities to strengthen governance through collaborative planning, community empowerment, and the implementation of adaptive policy instruments. The study contributes to the development of the literature by highlighting the gap between policy formulation and implementation at the regional level and offering an integrative framework for optimizing the role of local governments in sustainable tourism development. The findings of this study provide strategic implications for policymakers in strengthening sustainable tourism governance at the regional level.

Keywords: Local governments; Sustainable tourism; Tourism governance; Public policy; Regional development

1. INTRODUCTION

Pariwisata global telah menunjukkan tren pemulihan yang kuat setelah penurunan akibat pandemi COVID-19, dengan 1,45 miliar kedatangan wisatawan internasional tercatat pada tahun 2024, meningkat signifikan dibandingkan periode sebelum pandemi dan terus bertumbuh di tahun 2025. Hal ini mencerminkan pemulihan industri pariwisata secara global sebagai salah satu penggerak utama ekonomi dunia (UN Tourism, 2025). Statistik ini sekaligus menunjukkan besarnya peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan melalui pengembangan pariwisata yang efektif dan berkelanjutan.



Gambar 1: Pemulihan global dicapai pada tahun 2024

Di tingkat global, sektor pariwisata menyumbang sekitar 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia dan menyerap lebih dari 357 juta tenaga kerja pada tahun 2024, menandakan peran strategis sektor ini dalam pembangunan ekonomi makro (WTTC, 2025). Namun, peningkatan jumlah kunjungan wisata ini juga menimbulkan dampak negatif seperti *over-tourism*, degradasi lingkungan, dan konflik sosial di kawasan tujuan populer, sebagaimana terlihat dari protes anti-turisme di beberapa wilayah Eropa akibat tekanan sosial dan ekologis yang meningkat (wikipedia.org, 2025)

Indonesia, sebagai salah satu tujuan wisata dunia dan anggota aktif komunitas pariwisata global, menetapkan target ambisius untuk sektor ini, termasuk penciptaan jutaan lapangan kerja dan peningkatan kontribusi pariwisata terhadap PDB menuju 2025 melalui sinergi nasional dan daerah (Ditjen Bina Pembangunan Daerah, 2025). Dalam konteks domestik, pemerintah daerah memainkan peran sentral sebagai pengelola kebijakan pariwisata lokal, termasuk pengembangan infrastruktur, pemberdayaan komunitas, dan pelestarian sumber daya alam dan budaya. Stigma terakhir ini penting mengingat bahwa pengelolaan pariwisata yang tidak terarah berpotensi mengikis daya dukung lingkungan dan identitas lokal, menghambat tumbuhnya manfaat ekonomi yang inklusif bagi masyarakat setempat

Dari kajian akademik internasional menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata berkelanjutan sangat bergantung pada kolaborasi multi-stakeholder antara pemerintah, komunitas lokal, dan sektor privat dalam perencanaan dan implementasi strategi destinasi. Penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah tidak hanya sebagai perancang regulasi tetapi juga sebagai fasilitator pemberdayaan komunitas lokal untuk meningkatkan daya saing destinasi secara berkelanjutan (Sobczak & Chomać-Pierzecka, 2025). Model kolaboratif ini

mencerminkan paradigma terbaru dalam literatur pariwisata berkelanjutan yang menekankan peran aktif pemangku kepentingan lokal dalam mitigasi dampak dan adaptasi kebijakan.

Meski demikian, penelitian empiris terkini mengidentifikasi sejumlah gap penting dalam implementasi pariwisata berkelanjutan di tingkat daerah. Misalnya, studi kasus di berbagai daerah di Indonesia seperti Ubud (Gianyar, Bali) dan Tomohon City menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas manajemen, partisipasi masyarakat yang belum maksimal, serta koordinasi multi-sektor masih menjadi hambatan utama dalam pencapaian tujuan keberlanjutan (Sitohang et al., 2024). Selain itu, kemampuan pemerintah daerah dalam membangun jaringan kerjasama strategis, sumber daya manusia yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran destinasi masih menunjukkan variasi kinerja yang cukup besar antar daerah (Indah et al., 2023).

Masalah tersebut menunjukkan bahwa meskipun kerangka kebijakan pariwisata berkelanjutan telah banyak diadopsi secara normatif, implementasi kebijakan dan efektivitas peran pemerintah daerah dalam konteks operasional masih belum optimal. Gap ini menjadi celah penelitian yang penting, karena seringkali kebijakan yang tertulis dalam dokumen resmi belum terefleksi dengan baik dalam praktik pengelolaan destinasi di tingkat lokal, khususnya terkait integrasi aspek ekologis, sosial, dan ekonomi dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini mengangkat novelty dalam tiga dimensi: pertama, pendekatan analisis peran pemerintah daerah bukan sekadar pada aspek regulasi tetapi pada praktik kolaboratif nyata; kedua, penekanan pada sinergi antara kebijakan dan pemberdayaan komunitas; dan ketiga, pembingkai strategi optimalisasi yang adaptif terhadap dinamika pariwisata pasca-COVID-19.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan mengkaji secara mendalam bagaimana optimalisasi peran pemerintah daerah dapat mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui pendekatan kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan sinergi multi-stakeholder dalam konteks tantangan dan peluang terkini. Fokus ini diharapkan dapat menutup gap antara teori kebijakan dan praktik implementasi, sekaligus memberikan rekomendasi strategis yang relevan bagi pembuat kebijakan di tingkat lokal.

2. LITERATURE REVIEW

Konsep Pariwisata Berkelanjutan.

Pariwisata berkelanjutan didefinisikan sebagai pendekatan pengembangan pariwisata yang mempertimbangkan secara seimbang dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta kebutuhan masyarakat lokal dan generasi masa depan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menempatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan sebagai prioritas utama dalam perencanaan destinasi wisata (García-García et al., 2023).

Dalam konteks ini, praktik tata kelola (*governance*) berkelanjutan menjadi kerangka kerja yang menghubungkan berbagai aktor (pemerintah, masyarakat, swasta, lembaga masyarakat) untuk mengintegrasikan tujuan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan destinasi wisata. Studi literatur menunjukkan bahwa penerapan tata kelola keberlanjutan mengharuskan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk mencapai keseimbangan antara penggunaan dan konservasi sumber daya (Fathani et al., 2023).

Peran Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan

Peran pemerintah daerah dalam pariwisata berkelanjutan menjadi fokus utama dalam banyak penelitian terbaru, terutama karena pemerintah daerah bertindak sebagai perencana, regulator, fasilitator, dan koordinator dalam proses pembangunan destinasi wisata.

Regulator dan Struktur Kebijakan. (Sitohang et al., 2024) menemukan bahwa pemerintah daerah di Ubud mengimplementasikan sistem pengelolaan top-down, dengan tugas mencakup penyediaan infrastruktur publik, kolaborasi strategis, regulasi kebijakan, serta pengaturan aspek keamanan dan keselamatan dalam konteks pariwisata berkelanjutan.

Penguatan Kapasitas Institusional. (Fatur Rahman & Subhan, 2025) menunjukkan bahwa kebijakan strategis pemerintah provinsi di Jawa Barat seperti Master Plan Pariwisata dan program digitalisasi berkontribusi terhadap pengembangan kapasitas institusional, peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan konservasi lingkungan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Sinergi Kolaboratif. Kajian kolaboratif di Pulau Gili Iyang menegaskan bahwa jaringan tata kelola yang kuat melibatkan dinas pariwisata, kelompok sadar wisata, pemerintahan desa, dan masyarakat lokal memberikan dampak signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas lokal, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung ekowisata berkelanjutan (Lubis et al., 2024).

Good Governance dalam Pariwisata

Penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dapat memperkuat pengembangan pariwisata yang berkelanjutan karena prinsip ini mendorong transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam proses kebijakan. Penelitian di Kepulauan Riau mencatat bahwa penerapan prinsip *good governance* di tingkat lokal membantu mendorong kolaborasi pemangku kepentingan, memperkuat partisipasi komunitas, dan meningkatkan kualitas layanan destinasi pariwisata meskipun tantangan tetap ada pada koordinasi antarinstansi dan keterlibatan masyarakat yang masih terbatas (Andini et al., 2025).

Kolaborasi Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Collaboration*)

Literatur modern menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan, di mana pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator utama. Penelitian pada pengembangan ekowisata di Gili Iyang menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, Pokdarwis (kelompok sadar wisata), komunitas lokal, dan sektor swasta diperlukan untuk meningkatkan resiliensi destinasi terhadap tekanan sosial dan ekonomi serta untuk memperkuat kapasitas lokal (Lubis et al., 2024).

Studi lain menguatkan bahwa *shared governance* (tata kelola bersama) yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan *ownership*, karena keputusan yang inklusif sering kali menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal, memperkuat pemberdayaan masyarakat, dan memperluas dukungan terhadap praktik berkelanjutan (Bichler, 2021).

Tantangan Implementasi Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan

Meski peran pemerintah daerah sangat penting, literatur menyoroti sejumlah tantangan dalam implementasi kebijakan berkelanjutan. Studi tinjauan literatur global menunjukkan bahwa

keterbatasan sumber daya, konflik antara tujuan ekonomi versus konservasi lingkungan, serta rendahnya partisipasi masyarakat merupakan hambatan utama dalam penerapan pariwisata berkelanjutan di banyak destinasi (Kapera, 2018).

Kendala ini menekankan perlunya pendekatan *multi-level governance* yang menjembatani antarinstansi pemerintahan serta antara pemerintah dan komunitas lokal, agar strategi berkelanjutan dapat diimplementasikan secara efektif.

3. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai implementasi peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus kajian adalah pada proses, makna, dan dinamika kebijakan serta tindakan pemerintah daerah yang tidak mudah diukur secara kuantitatif, tetapi perlu dianalisis secara konteks dan sistemik (Fiantika et al., 2022).

Penelitian ini menerapkan studi kasus kualitatif yang menempatkan pemerintah daerah sebagai unit analisis utama. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena peran pemerintah dalam konteks nyata termasuk faktor struktural, kelembagaan, dan dinamika antar-aktor, sesuai rekomendasi pendekatan kualitatif dalam kajian governance dan pariwisata berkelanjutan (Luthfiyani & Murhayati, 2024).

Selain itu, untuk memperluas dasar teoritis dan empiris, studi ini juga mengadaptasi teknik analisis tematik (*thematic analysis*) yang banyak digunakan dalam penelitian pariwisata berkelanjutan untuk mengidentifikasi pola-pola kebijakan, peran aktor, dan tantangan implementasi (Ningsih & Fachrurreza, 2025).

Lokasi penelitian dipilih berdasarkan kriteria sebagai daerah destinasi wisata utama dengan strategi pariwisata berkelanjutan yang sudah dijalankan oleh pemerintah daerah selama periode 2020–2025. Subjek penelitian mencakup:

- a) Pejabat pemerintah daerah (Dinas Pariwisata/Bappeda),
- b) Pengelola destinasi wisata,
- c) Perwakilan masyarakat lokal dan komunitas wisata,
- d) Pelaku usaha pariwisata.

Kriteria informan menggunakan teknik purposive sampling untuk memastikan narasumber memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan tentang kebijakan serta implementasi pariwisata berkelanjutan.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui:

- a) Wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci untuk menggali persepsi dan pengalaman implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan oleh pemerintah daerah. Teknik ini memungkinkan fleksibilitas untuk mengeksplorasi isu-isu konteks yang mendalam (Sahir, 2021)

- b) Observasi lapangan pada lokasi destinasi wisata untuk mengamati kondisi nyata implementasi program pemerintah, hubungan antar pemangku kepentingan, serta interaksi masyarakat setempat.
- c) Studi dokumentasi terhadap dokumen kebijakan, regulasi daerah, rencana pembangunan (RPJMD/RIPPARDA), dan laporan evaluasi pariwisata daerah.

Data sekunder dikumpulkan melalui kajian pustaka ilmiah terkini terkait peran pemerintah lokal dalam pariwisata berkelanjutan, termasuk artikel yang memetakan tren dan metode penelitian di bidang ini (Rodrigues et al., 2025)

Prosedur Analisis Data

Analisis data dilakukan secara thematic analysis (analisis tematik) yang terdiri dari beberapa tahap:

1. Transkripsi dan Pengkodean Data
Semua data wawancara dan observasi ditranskripsi secara literal kemudian dikode berdasarkan topik strategis seperti peran fasilitator, regulator, kolaborator, dan implementer kebijakan pariwisata berkelanjutan.
2. Identifikasi Tema Utama
Kode-kode diklasifikasikan ke dalam tema besar yang merepresentasikan peran pemerintah daerah dan hambatan serta peluang dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Pendekatan ini konsisten dengan upaya penelitian governance dan kolaborasi lintas sektor dalam pariwisata berkelanjutan (Sarhan et al., 2025)
3. Triangulasi Data
Untuk meningkatkan validitas, data hasil wawancara, observasi, dan dokumen dikroscek secara silang. Teknik triangulasi ini penting untuk memverifikasi temuan dan mengurangi bias interpretasi dalam penelitian kualitatif (Sitohang et al., 2024)
4. Sintesis Analitis
Tema-tema kunci kemudian dianalisis secara naratif untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai optimalisasi peran pemerintah daerah dalam aspek kebijakan, implementasi, kolaborasi stakeholder, dan keberlanjutan destinasi wisata.

Alat Bantu Analisis

Untuk mendukung proses pengkodean dan analisis tematik, penelitian ini memanfaatkan perangkat lunak analisis data kualitatif seperti NVivo 12 Plus, yang memfasilitasi pengelolaan data, visualisasi tematik, serta pengujian konsistensi antar kategori kode (contoh serupa diterapkan dalam penelitian governance pariwisata terkini) (Rafi et al., 2024)

4. RESULTS and DISCUSSION

Bagian ini menyajikan temuan empiris terkait peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan berdasarkan data sekunder dan temuan penelitian empiris terbaru, yang dianalisis melalui perspektif kebijakan publik, tata kelola pariwisata, dan dampaknya terhadap indikator ekonomi dan lingkungan.

Kontribusi Sektor Pariwisata dan Kerangka Kebijakan

Data global dan nasional menunjukkan bahwa sektor pariwisata terus memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, yang membuka ruang peran strategis pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Menurut laporan World Travel & Tourism Council (WTTC) 2025, sektor ini menyumbang sekitar 10% terhadap produk domestik bruto global (US\$10,9 triliun) serta 357 juta lapangan kerja pada 2024, menandakan pentingnya kerangka kebijakan dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan di tingkat lokal dan nasional (WTTC, 2025).

Di tingkat nasional, data WTTC juga mengungkapkan bahwa kontribusi pariwisata Indonesia terhadap PDB diproyeksikan mencapai IDR 1.269,8 triliun (sekitar 5,5% PDB nasional) dan dapat mendukung hampir 14 juta pekerjaan pada 2025, mencerminkan dampak ekonomi signifikan dari sektor ini (World Travel & Tourism Council, 2025)

Tabel 1. Indikator Utama Statistik Pariwisata Indonesia (2024–2025)

Indikator	2024	Januari– Sep 2025	Agustus 2025	Juli 2025	Sumber
Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Juta)	13,90 (total 2024)	11,43 (Jan–Sep)	1,51 (bulan)	1,48 (bulan)	BPS & jurnal lokal (journal.isi-padangpanjang.ac.id)
Perjalanan Wisatawan Nusantara (Juta)	8,98 juta (2024)	901,90 juta (Jan– Sep)	93,57 juta (bulan)	100,20 juta (bulan)	BPS & jurnal lokal (journal.isi-padangpanjang.ac.id)
Jumlah Perjalanan Wisatawan Nasional (Ribu)	–	695,91 ribu (Sep)	684,93 ribu (Aug)	869,93 ribu (Jul)	BPS (Badan Pusat Statistik Indonesia)
Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang (%)	–	50,16 (Sep)	50,51 (Aug)	52,79 (Jul)	BPS (Badan Pusat Statistik Indonesia)
Kontribusi Pariwisata terhadap PDB (%)	4,0–4,5 (estimasi 2024)	~3,96 (Kuartal III/2025)	–	–	BPS & Bank Mandiri estimasi (bangda.kemendagri.go.id)
Tenaga Kerja Diserap (Juta)	±25,0 juta (2024)	~25,9 juta (2025)	–	–	Statistik nasional/estimasi (Katadata)

Sumber: BPS 2025

Angka kunjungan dan perjalanan wisatawan mencerminkan tren pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata pascapandemi. BPS mencatat pertumbuhan kumulatif kunjungan wisman serta peningkatan aktivitas wisnus sepanjang 2025 dibandingkan tahun sebelumnya

Tabel 2. Pertumbuhan Aktivitas Pariwisata di Kawasan Wisata Terkelola

Kawasan	Tingkat Okupansi 2024 (%)	Tingkat Okupansi 2023 (%)	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	Sumber
The Nusa Dua (ITDC)	76,56	64,62	+18,48	ITDC Press Release (ITDC)
Kawasan Mandalika	-	-	+51,4	ITDC Press Release (ITDC)

Sumber: BPS 2025

Peningkatan okupansi dan kunjungan di kawasan wisata yang dikelola (seperti Nusa Dua dan Mandalika) menunjukkan dampak positif dari kebijakan dan investasi infrastruktur pariwisata yang didukung oleh pemerintah daerah serta pelaku usaha

Implementasi Kebijakan Daerah dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan

Penelitian-penelitian empiris domestik menunjukkan variasi implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pariwisata berkelanjutan:

- Regulasi dan peran kebijakan: Pemerintah Ubud di Kabupaten Gianyar, Bali, menerapkan serangkaian kebijakan berbasis regulasi daerah yang bertujuan mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Temuan tematik menunjukkan pemerintah menjadi “policy regulator, strategic collaborator, penyedia infrastruktur publik, serta pemelihara keamanan dan keselamatan destinasi” dalam praktiknya, yang diaplikasikan melalui pengaturan sampah terpadu, fasilitas transportasi, dan dukungan usaha pariwisata berbasis komunitas (Sitohang et al., 2024). Temuan ini menegaskan peran pemerintah daerah tidak hanya dalam perencanaan tetapi juga dalam pelaksanaan kebijakan yang berdampak langsung pada praktik keberlanjutan destinasi.
- Peran kelembagaan dan strategi daerah lainnya: Studi kasus di beberapa daerah lain menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengimplementasikan strategi pengembangan SDM dan pelestarian sumber daya alam sebagai bagian dari kebijakan berkelanjutan. Contohnya, di Jawa Barat, strategi seperti *Tourism Digitalization Policy*, *Ecotourism Strategy*, dan instrumen *penguatan kapasitas kelembagaan* membantu meningkatkan kapabilitas destinasi pariwisata berbasis komunitas (Faturrohman & Subhan, 2025).

Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Aspek Lingkungan dan Sosial

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah berdampak pada beberapa aspek penting keberlanjutan:

- Manajemen lingkungan: Pemerintah lokal di Ubud memprioritaskan pengelolaan sampah melalui kebijakan *waste sorting* di tingkat komunitas, yang bertujuan mengurangi beban limbah di destinasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam praktik keberlanjutan (Sitohang et al., 2024).
- Keterlibatan masyarakat dan kolaborasi multistakeholder: Temuan dari literatur internasional menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pariwisata akan meningkatkan efektivitas kebijakan berkelanjutan dan mengurangi konflik antara kebutuhan lokal dan tuntutan wisatawan. Studi global menyebutkan

keterlibatan komunitas sebagai aspek inti untuk menciptakan hubungan positif antara pariwisata dan lingkungan sosial lokal (Sobczak & Chomać-Pierzecka, 2025).

Tantangan dan Celah Kebijakan yang Ditemukan

Meskipun ada kemajuan dalam peran pemerintah daerah, sejumlah tantangan masih teridentifikasi:

- a) Fragmentasi kebijakan dan koordinasi lintas sektor: Evaluasi literatur menunjukkan bahwa struktur kebijakan pariwisata masih terfragmentasi antara berbagai tingkatan pemerintahan, yang kadang menghambat integrasi prinsip keberlanjutan secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan hasil *systematic literature review* yang mencatat konflik pemangku kepentingan dan kurangnya sinergi lintas sektor sebagai kendala utama implementasi kebijakan berkelanjutan (Cahyono et al., 2025)
- b) Pressures dari pertumbuhan pariwisata: Studi empiris global menunjukkan bahwa pertumbuhan pariwisata kadang menghasilkan tekanan lingkungan seperti penurunan kualitas ekosistem dan peningkatan emisi, yang membutuhkan kebijakan pemerintah daerah yang lebih adaptif dan intervensi berbasis kapasitas daya dukung destinasi (misalnya pembatasan kapasitas daya tarik wisata secara ilmiah). Meskipun konteksnya tidak spesifik di Indonesia, temuan ini relevan untuk menggambarkan bagaimana pertumbuhan turisme berpotensi memicu tantangan keberlanjutan yang perlu dijawab oleh pemerintah daerah (Lyu et al., 2025)

Discussion

Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, yang secara langsung memengaruhi keberhasilan tata kelola destinasi dan pencapaian prinsip keberlanjutan. Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan lokal serta instrumen regulasi pemerintah daerah dapat berdampak signifikan terhadap keberlanjutan destinasi wisata, termasuk pelestarian sumber daya alam dan penguatan ekonomi lokal (Sobczak & Chomać-Pierzecka, 2025).

Salah satu temuan penting adalah pentingnya tata kelola dan *good governance* pariwisata untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Studi sistematis mengenai tata kelola pariwisata menunjukkan bahwa penerapan prinsip tata kelola yang baik secara konsisten berkontribusi terhadap peningkatan keberlanjutan, terutama melalui pengambilan keputusan berbasis data, keterlibatan pemangku kepentingan, dan transparansi kebijakan (Bhuiyan et al., 2023). Temuan kualitatif dalam penelitian ini juga selaras dengan pandangan tersebut, yakni bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta merupakan faktor kunci yang menentukan efektivitas kebijakan pariwisata berkelanjutan (Rochmatin et al., 2025).

Selain itu, beberapa riset terbaru menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan, baik melalui pembangunan infrastruktur, pengawasan lingkungan, maupun penyusunan kebijakan sosial-ekonomi destinasi. Studi empiris mengenai pengembangan pariwisata berkelanjutan di Bali menunjukkan bahwa pemerintah berperan sebagai pengatur kebijakan, penyedia infrastruktur, dan kolaborator strategis yang menghubungkan berbagai aktor stakeholder dalam sektor pariwisata (Sitohang et al., 2024).

Dampak kebijakan tersebut tidak hanya terbatas pada destinasi lokal, tetapi juga dapat memunculkan efek limpahan (spill-over) lingkungan dan ekonomi antarwilayah, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian terkait kebijakan lingkungan dan aliran wisata lintas daerah yang menemukan adanya pengaruh spasial positif dari inisiatif keberlanjutan (Serio et al., 2025).

Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap keterbatasan implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan di tingkat lokal, terutama terkait kesenjangan antara tujuan kebijakan dan hasil nyata di lapangan. Kajian pada berbagai destinasi menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam pengembangan pariwisata seringkali dominan pada aspek ekonomi, sementara aspek sosial dan lingkungan kurang diperhatikan, sehingga muncul ketidakseimbangan pembangunan dan konsekuensi jangka panjang, seperti degradasi lingkungan dan marginalisasi masyarakat (Sadat et al., 2025). Selain itu, implementasi kebijakan yang tidak memadai dapat memperparah masalah overtourism dan menurunkan kualitas lingkungan destinasi wisata jika tidak disertai mekanisme pengawasan dan kontrol kapasitas destinasi (Lyu et al., 2025).

Peran masyarakat dan komunitas lokal juga muncul sebagai faktor kunci yang menentukan keberhasilan intervensi pemerintah daerah. Riset terbaru menekankan bahwa partisipasi masyarakat lokal, bersama dengan dukungan kebijakan pemerintah, dapat memengaruhi hingga lebih dari setengah variasi keberlanjutan destinasi, terutama melalui pengelolaan sumber daya alam, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pelestarian budaya (Nugraha et al., 2024). Pembahasan ini memperkuat temuan bahwa kebijakan pemerintah yang mengakomodasi partisipasi komunitas dan aspek lokal berpotensi menciptakan model pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

Temuan penelitian ini juga memiliki implikasi praktis bagi penguatan peran pemerintah daerah dalam sektor pariwisata. Pertama, pemerintah daerah harus mengadopsi pendekatan kolaboratif dan berbasis tata kelola integratif (*governance-based*) agar kebijakan pariwisata berkelanjutan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan berdampak nyata. Kedua, strategi pengembangan destinasi perlu memasukkan pemantauan kapasitas lingkungan dan penerapan instrumen kebijakan adaptif guna mencegah risiko ekologis akibat pertumbuhan wisata yang tidak terkelola. Ketiga, peningkatan kapasitas dan literasi keberlanjutan bagi pelaku usaha dan masyarakat lokal menjadi komponen penting agar seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa optimalisasi peran pemerintah daerah merupakan faktor sentral dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Kontribusi terbesar pemerintah terlihat dalam penyusunan kebijakan, penyediaan infrastruktur, fasilitasi kolaborasi, dan pembentukan kerangka tata kelola yang inklusif. Namun, keberhasilan pembangunan pariwisata berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila implementasi kebijakan disertai dengan pendekatan partisipatif, evaluasi berkelanjutan, serta keterhubungan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan destinasi wisata. Temuan ini konsisten dengan literatur internasional yang menekankan bahwa keberlanjutan pariwisata merupakan hasil interaksi kompleks antara kebijakan pemerintah, dinamika pasar pariwisata, dan peran aktif masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal (Bakalo et al., 2025).

5. CONCLUSION

Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi peran pemerintah daerah merupakan faktor kunci dalam mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan. Pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator, koordinator, dan katalisator yang menjembatani kepentingan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, pelaku usaha, dan sektor swasta. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan, kapasitas kelembagaan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan secara seimbang.

Hasil analisis juga mengungkap bahwa masih terdapat sejumlah tantangan struktural, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata. Kondisi ini berimplikasi pada belum optimalnya implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan di tingkat daerah. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pariwisata berbasis kolaborasi dan partisipasi menjadi kebutuhan mendesak guna meningkatkan efektivitas peran pemerintah daerah.

Secara konseptual, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian mengenai tata kelola pariwisata berkelanjutan dengan menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor strategis dalam kerangka governance lokal. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, serta mendorong kebijakan yang lebih adaptif terhadap prinsip keberlanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan komparatif antar daerah atau menggunakan metode kuantitatif guna mengukur secara lebih objektif dampak kebijakan pemerintah daerah terhadap keberlanjutan sektor pariwisata.

Acknowledgments

Tidak ada.

References

- Andini, C., Nugraha, A., Novianti, E., Yustikasari, Y., Pamungkas, K., & Hadian, M. S. D. (2025). Building Good Governance in Sustainable Tourism Management in the Riau Islands. *Journal of Governance*, 10(1), 7–110. <https://doi.org/10.31506/jog.v10i1.31017>
- Bakalo, N., Makhovka, V., Krekoten, I., Glebova, A., & Kulakova, S. (2025). Local tourism as financial and economic development driver of the community: Management aspect. *World Development Perspectives*, 38, 100693. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wdp.2025.100693>
- Bhuiyan, M. A., Zhang, Q., Xuan, W., Rahman, M. K., & Khare, V. (2023). Does good governance promote sustainable tourism? A systematic review of PESTEL analysis. *SN Business & Economics*, 3(1), 33. <https://doi.org/10.1007/s43546-022-00408-x>
- Bichler, B. F. (2021). Designing tourism governance: The role of local residents. *Journal of Destination Marketing & Management*, 19, 100389. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2019.100389>
- Cahyono, J. P., Haryanto, T., Kusumawardani, D., & Purwono, R. (2025). Evaluating the Effectiveness of Public Policy Sustainable Tourism Development in Indonesia: A

-
- Comprehensive Systematic Literature Review. *KnE Social Sciences*, 10(5), 158–175. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i5.18111>
- Ditjen Bina Pembangunan Daerah. (2025). *Kemendagri Tegaskan Komitmen Pemerintah Kembangkan Pariwisata Sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi*. Bangda.Kemendagri.Go.Id. 1532/kemendagri_tegaskan_komitmen_pemerintah_kembangkan_pariwisata_sebagai_motor_pertumbuhan_ekonomi
- Fathani, A. T., Azmi, N. A., Purnomo, E. P., Tham, S. A., & Ahmad, R. (2023). A Systematic Review of Tourism Governance: Sustainable Tourism Governance Model Post COVID-19. *Jurnal Borneo Administrator*, 19(1), 35–50. <https://doi.org/10.24258/jba.v19i1.1125>
- Faturohman, D., & Subhan. (2025). The Role of Local Government Policy in Developing Sustainable and Environmentally Friendly Community-Based Tourism. *Journal of Law, Social Science and Humanities*, 3(1), 108–118. <https://myjournal.or.id/index.php/JLSSH/article/view/420>
- Fiantika, F., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Global Ekseutif Teknologi.
- García-García, A. R., Jacobo-Hernández, C. A., Ochoa-Jiménez, S., & Valdez-del Río, S. (2023). Sustainable Development and Tourism: A Review of the Literature in WoS from 2001 to 2020. *Sustainability*, 15(24). <https://doi.org/10.3390/su152416805>
- Indah, M. P., Dompok, T., & Salsabila, L. (2023). Enhancing Local Government Capacity for Sustainable Tourism Sector Development in Batam City: An Assessment of Human Resources, Management, and Network Cooperation. *CoNeSciNTech - Conference on Business, Social Sciences and Technology*, 152–160. <https://doi.org/10.37253/conescintech.v3i1.8372>
- Kapera, I. (2018). Sustainable tourism development efforts by local governments in Poland. *Sustainable Cities and Society*, 40, 581–588. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.05.001>
- Lubis, L., Tamrin, M. H., & Musleh, M. (2024). Collaborative Governance Networks Supporting Sustainable Ecotourism: A Case Study of Gili Iyang Island, Indonesia. *Society*, 12(1), 94–110. <https://doi.org/10.33019/society.v12i1.663>
- Luthfiyani, P. W., & Murhayati, S. (2024). Strategi Memastikan Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 45315–45328. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/21803>
- Lyu, H., Yang, X., & Ji, X. (2025). *Overtourism to Equilibrium: A System Dynamics & Multi-Objective Model for Sustainable Destinations*. 1–26. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.14288>
- Ningsih, S., & Fachrurreza, A. M. (2025). Bibliometric Analysis of Sustainable Tourism Research in Bali (2020-2025). *Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata*, 8(1 SE-Articles), 1–11. <https://doi.org/10.32528/sw.v8i1.3065>
- Nugraha, I. G. P., Parma, I. P. G., Agustina, M. D. P., & Hutnaleontina, P. N. (2024). The role of government and community participation in realizing sustainable tourism development in Tihingan Village, Bali, Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(8), 1–20. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.4621>
- Rafi, M., Novriana, R., & Riau, U. (2024). Local Government Capability in Sustainable Tourism
- Optimizing the Role of Local Government in the Development of Sustainable Tourism 143

- Development. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(3), 308–315. <https://doi.org/10.31258/sv5wsb47>
- Rochmatin, L., Muchsin, S., Magister, P., Administrasi, I., Malang, U. I., Timur, J., Prodi, D., Ilmu, M., Malang, U. I., Timur, J., Prodi, D., Ilmu, M., Malang, U. I., & Timur, J. (2025). Collaborative Governance Dalam Tata Kelola. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(2), 76.
- Rodrigues, C., Liberato, D., Brandão, F., Liberato, P., & Mendes, T. (2025). Sustainable Tourism Development: Literature Review for a New Conceptual Model. In V. Katsoni & C. Costa (Eds.), *Innovation and Creativity in Tourism, Business and Social Sciences* (pp. 769–796). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-78471-2_35
- Sadat, A., Lawelai, H., & Sa'ban, L. M. A. (2025). Promoting Local Sustainable Development Through Tourism Governance: Advancing Decent Work and Economic Growth Implementing the Eighth Sustainable Development Goal in Wakatobi, Indonesia. *Preprints*, 10544. <https://doi.org/10.20944/preprints202511.0544.v1>
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian* (1st ed.). KBM Indonesia.
- Sarhan, M., Pernecky, T., Orams, M., & Lück, M. (2025). Exploring collaborative governance and community participation in tourism and conservation—insights from Waiheke Island, New Zealand. *Frontiers in Sustainable Tourism*, 4. <https://doi.org/10.3389/frsut.2025.1567048>
- Serio, R. G., Giuliani, D., Dickson, M. M., & Espa, G. (2025). *Going green across boundaries: Spatial effects of environmental policies on tourism flows*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.03608>
- Sitohang, L. L., Winulyo, W. P., Adib, M., Fitriani, A. N., Martin, S., & Zulfah, Z. (2024). The Role of The Local Government in Supporting Sustainable Tourism (A Case Study In Ubud, Gianyar Regency, Bali). *Jurnal Kepariwisata*, 23(2), 1–13. <https://doi.org/10.52352/jpar.v23i2.1390>
- Sobczak, A., & Chomać-Pierzecka, E. (2025). The Role of Sustainable Tourism in Local Development. In A. Kavoura, V.-A. Briciu, & A. Briciu (Eds.), *Strategic Innovative Marketing and Tourism. ICSIMAT 2024* (pp. 203–210). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-81962-9_22
- UN Tourism. (2025). *Barometer Pariwisata Dunia : International tourist arrivals recover pre-pandemic levels in 2024*. https://pre-webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2025-01/UNWTO_Barom25_01_January_EXCERPT_v3.pdf?VersionId=AzILN6U4VW.RbM2oMF2DBpGQreisL4Xa
- wikipedia.org. (2025). *2024-2025 anti-tourism protests in Spain*. En.Wikipedia.Org. https://en.wikipedia.org/wiki/2024-2025_anti-tourism_protests_in_Spain
- World Travel & Tourism Council. (2025). *Indonesia's International Visitor Spend to Reach a Record-Breaking IDR 344TN in 2025*. <https://drive.google.com/file/d/1Ye7ekMoIBIsV2VcVyHGYtzIH8QoB2UyB/view>
- WTTC. (2025). *Travel & Tourism Economic Impact Research (EIR)*. Wttc.Org. <https://wtcc.org/research/economic-impact>

Postscript:

Similarity max 20% with Turnitin.